

 Institute for Research and Empowerment	“Meeting Notes Lokakarya Sinergi RPJMD-RPJMN bidang Desa dan Kawasan Perdesaan” (Pk. 13.00-15.15 WIB)		Tanggal Laporan: 08 Juli 2020
	Lokasi: Zoom Meeting IRE Yogyakarta	Tanggal: 29 Juni 2020	
Moderator: Gusti Nur Asla Shabia Notulensi: Ilham Alfin Saputra	Perihal: <i>“Penguatan isu – isu Strategis Desa dan Kawasan Perdesaan dalam Perencanaan Pembangunan Daerah”</i>	Distribution: Peserta Rapat	

Pengantar (09.30)

Oleh: **Dina Mariana**

IRE kebetulan dalam kesempatan kali ini mencoba untuk mulai focus pada isu yang bersifat teknokratis, biasanya IRE yang dikenal dengan aktif riset – riset di level desa maka kali ini IRE mencoba memulai menjamah di isu – isu kebijakan yang mencoba untuk menautkan antara perencanaan pembangunan Nasional, Daerah dan Desa. Dalam hal Ini juga mengambil momentum, karena beberapa kabupaten atau kota akan menyelenggarakan PILKADA serentak dan ini adalah momentum terbaik, karena daerah – daerah tersebut juga harus menyiapkan dokumen RPJMD yang akan IRE riset agar menjadi menarik dan dilirik oleh kabupaten atau kota. Tahun 2019, sekitar akhir tahun IRE menyelenggarakan riset terkait implementasi undang-undang Desa. Ada beberapa temuan yang IRE rasa cukup menarik yang kemudian menjadi pilihan awal pilihan isu ini untuk di fokus diisukan menjadi isu perencanaan dan penganggaran Desa. Beberapa temuan IRE yang menyangkut perencanaan pembangunan dari Nasional hingga desa kami menemukan beberapa praktek implementasi undang – undang Desa ada gapantara kebijakan dan operasionalnya. Temuan penelitian IRE :

1. Kedudukan desa masih dilihat dalam kacamata lama, pembangunan desa masih banyak diatur oleh pemerintah supra desa. Pelaksanaan kewenangan desa pun terbentur regulasi daerah dan pusat.
2. *Bottleneck* Implementasi UU Desa banyak ditemukan di tingkat pusat dan kabupaten atau kota karena lemahnya peran pembinaan dan pengawasan.
3. Diskoneksi dokumen perencanaan pusat, daerah dan desa karena ruang diskresi daerah dan desa yang terbatas (ex. Pendampingan dan DD)
4. Disorientasi pembangunan kawasan Perdesaan di tingkat daerah.

SESI PERTAMA

Diskusi Panel (09.32)

Moderator :

Pembicara:

1. Anwar Sanusi, Ph.D
2. Dr. Sutoro Eko Yunanto
3. Dr. Velix Vernandi Wanggai, SIP
4. Rinekawiati Soelaeman, M.T.,M.PP

(Sekjen Anwar Sanusi) 09.32

Terimakasih, assalamualaikum wr. Wb selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua yang saya hormati pak felix, di diskusi ini saya bukan anggota sekjen melain anggota kagama saja. Kemudian yang saya hormati Dr. Bambang Hidayana selaku Direktur eksekutif IRE. Juga saya hormati kolega saya Pak Toro dan juga narasumber yang lain termasuk ibu rineka dan juga tentunya para kepala Bappeda dan juga bapak ibu sekalian yang saya hormati. Kami sangat menunggu dari mbak dina terkait isu-isu apa ? yang menjadi hal yang harus kami perhatikan terutama sebagai kementerian yang menjalankan tugas mengawal UU No 6 tahun 2014. Mudah – mudahan apa yang sampaikan ini mudah diresposn terkait dengan apa yang kita diskusikan pada saat ini. Jadi kalau kita bicara terkait isu pembangunan kawasan Perdesaan memang kami bisa memaparkan ada tujuh isu yaitu:

1. Ketahanan ekoonomi yang berkualitas
2. Pengembangan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan.
3. Peningkatan SDM yang berdaya saing
4. Peningkatan karakter bangsa
5. Infrastruktur penunjang ekonomi dan pelayanan dasar
6. Peningkatan kualitas lingkungan hidup
7. Polhukhankam dan pelayanan public

Kami kebetulan disini adalah kalau di dalam isu kementerian desa BPD dan transmigrasi kita sebagai kementerian bertugas mengawal nomer dua yakni prioritas Nasional mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan. Nanti saya rasa mas felix akan mengelaborasi terkait dengan RPJMN dan prioritas Nasional yang berkait dengan isu desa dan perdesaan. Saya ingin menyampaikan bapak ibu sekalian terkait dengan situasi didalam pandemic covid ini ada hal yang harus kami antisipasi terutama adlah terkait dengan krisis pangan. Covid

ini yang telah menciptakan dampak utama, dampak yang terkait dengan ekonomi dan kesehatan. Intinya jika kita tidak bisa mengelola dengan baik maka krisis pangan akan terjadi dan harus kita hadapi. Sehingga terkait dengan isu ketahanan pangan atau dengan kemandirianpangan ini menjadi hal yang menurut saya jadi agenda utama yang harus kita persiapkan di tengah kemarin kita sudah melakukan pelaksanaan menerjemahkan kebijakan implementasi UU no 6 tahun 2014 tentang Desa. Kalau kita berbicara misalnya ketahanan pangan Desa tentunya kita juga harus bicara. “hal-hal apa yang harus kita persiapkan terutama bagaimana kita mampu mengidentifikasi berbagai persiapan pengumpulan data pangan, kemudian bagaimana data tersebut setelah data tersebut di kumpulkan , bagaimana kita bisa mampu untuk meningkatkan tingkat produktifitas pangan. Menurut saya produktivitas ini harus kita lakukan dengan beberapa kebijakan terkait misalnya perlindungan dan bantuan dari petani mulai bibit, pupuk dan sebagainya. Bahkan pupuk nanti diwacanakan subsidi tidak diberikan kepada perusahaan tapi diberikan secara langsung kepada masyarakat. Dan yang perlu kita dorong adalah teknologi pertanian yang bisa mendukung tingkat produktivitas pertanian. Hal berikutnya penguatan cadangan pangan Desa. Jadi kita berpikir bagaimana sebetulnya kehidupan normal baru menjadikan desa paper shop yang namanya ketahanan pangan. Dan yang perlu kita perhatikan bagaimana manajemen perdagangan yakni bagaimana kita bisa menjual produk – produk pertanian ke pasar dengan tentunya memberikan nilai manfaat kepada desa bukan hanya kepada masyarakat atau kelompok – kelompok tertentu yang selama ini memang diuntungkan adanya transaksi keuangan antara Desa dengan supra Desa. Hal yang lain memang yang sedang kami dorong menjadi bagian penting untuk penguatan ekonomi Desa adalah BUMDES. Bagaimana memfungsikan Badan Usaha Milik Desa betul-betul sebagai lembaga ekonomi yang akan menjadi pilar utama untuk aktivitas ekonomi produktif di perdesaan. Memang ada hal yang harus kita lakukan pembenahan oleh karena itu saat ini kita melakukan profiling. Profiling pemetaan terkait dengan kondisi BUMDES – BUMDES yang ada di Indonesia. Dari profiling yang sudah kita lakukan kita bisa melihat dari 18.915 BUMDES masih cukup sedikit dari 51.000 BUMDES kebanyakan badan usaha yang ada ini masih dalam tahapan berkembang untuk yang maju masih sangat sedikit. Maka dari itu perlu kita lakukan upaya – upaya serius untuk membuat kelembagaan Bumdes ini bisa semakin kuat. Banyak hal yang harus kita lakukan mulai misalnya adalah mengedukasi, meningkatkan literasi, terutama bagi pengelola BUMDES untuk bisa memiliki kemampuan. Misalnya adalah membangun kerjasama dengan mitra – mitra bisnis yang lain kemudian menguatkan manfaat social terutama di saat di kondisi pandemic ini ada yang namanya dana social yang beredar di pedesaan yang dikenal sebagai BLT Dana Desa. Beberapa Desa sudah sangat bagus memanfaatkan menggunakan BUMDES menjadi semacam lembaga yang menjual

aneka kebutuhan masyarakat Desa seperti sembako. Kami melihat fakta yang terkait dengan covid ada 1.671 BUMDES yang mengelola wisata, 99 persen desa wisata tutup. Ini bisa menjadi hal yang kita carikan solusi, beberapa mungkin sudah menerapkan penyesuaian dengan kehidupan normal baru. Namun demikian ini masih butuh usaha yang luar biasa, terutama memberikan peningkatan literasi terutama pengelola BUMDES bagaimana mereka bisa memahami untuk bisa menjalankan Desa wisata tapi juga memperhatikan kaidah – kaidah yang ada di *protocol* covid tersebut. Jadi ketika Desa Wisata tutup akan berdampak pada banyaknya pengelola BUMDES yang terpaksa mereka menganggur. Kemudian saya ingin menyampaikan beberapa hal yang kita (kementerian) lakukan terutama untuk penguatan-penguatan pedesaan. Focus kami dalam lima tahun kedepan ini agar Desa-Desa meningkat dari aspek pertama sisi kualitas ekonomi perdesaan semakin meningkat, kedua kualitas SDM semakin meningkat, dan ketiga tentunya sesuai mungkin yang juga sering temen-temen sampaikan bahwa Desa-Desa juga harus meningkatkan *social quotient*. Untuk itu kami pun didalam hal ini memiliki semacam program bagaimana pranata-pranata sosial betul-betul ditingkatkan agar Desa tidak hanya kuat secara ekonomi, tapi juga tetap mempertahankan pranata-pranata sosial yang ada. Sehingga dalam jangka pendek kami 5 tahun kedepan tetap menggunakan sumber daya lokal menjadi bagian penting kemudian melibatkan kelembagaan ekonomi desa, sinergi antar pelaku pembangunan di desa, orientasi tetap padat karya kita utamakan sebagai sebuah jarring untuk memberikan kesempatan bekerja kepada masyarakat Desa, kemudian juga pengaruh keutamaan Perempuan. Jadi dalam hal ini kami melihat salah satu contoh BLT Dana Desa ternyata ada 28 persen penerima manfaatnya adalah perempuan kepala keluarga. Hal ini menjadi modalitas penting bagaimana kita menggerakkan actor – actor yang didukung oleh perempuan bagi pembangunan desa atau penguatan Desa. Jangka pendek yang kedua adalah kita juga menyampaikan bagaimana kerjasama antar Desa, penguatan kegotong royongan masyarakat mobilisasi dana – dana yang memang sebetulnya ada di tingkat luar tapi bisa kita manfaatkan di tingkat perdesaan. Kemudian pemetaan potensi dari Kecamatan dan Desa dan juga KAbupaten. Jadi jangka inilah yang menurut saya menjadi satu titik tumpuh yang harus kita kuatkan terkait dengan pembangunan Desa dan Kawasan Perdesaan. Ada tiga hal yang saat ini sedang kita lakukan perbaikan terkait dengan Desa. Yang pertama kita (Kementerian Desa) mendapatkan satu mandat untuk mengawal bagaimana Dana Desa digunakan, kami kedepan ingin mendorong prioritas penggunaan Dana Desa lebih bersifat pada tematik kontekstual. Jadi pendekatan *one size fits all* ini akan segera kita akhiri. Kita ingin Dana Desa yang digunakan sesuai dengan kekuatan y-kekuatan yang di miliki oleh Desa. Kedua kita dorong penguatan data Desa, yang namanya covid 19 memberikan hikmah yang luar biasa bagaimana Desa – Desa ini harus kita

lakukan penguatan berbasis data. Sehingga dengan adanya data besar terkait dengan Desa apapun kebijakan yang terkait dengan Desa kita bisa menjalankan. Kita Sudah memiliki modalitas SIPEDE (Sistem Informasi Pembangunan Desa) namun demikian kalau untuk konteks kebutuhan kedepan penguatan Desa ini kita masih membutuhkan penguatan data kita. Dan yang terakhir kehidupan normal baru Insya Allah akan segera kita jalani segera akan kita masuki terutama di kehidupan Perdesaan. Kami ingin di normal baru ini sendinya apa, tetap yang namanya Desa harus bergerak, Desa harus bangkit tapi tetap memperhatikan kondisi factual di tengah – tengah masyarakat ada pandemik yang belum selesai. Selama vaksin belum ditemukan kita masih mengangga covid ini adalah sesuatu yang harus kita waspadai. Saya rasa itu yang menjadi bagian penting untuk saya sampaikan mbak Shabia. Dan juga tentunya Pak Bambang mohon izin saya mau off, nanti saya akan memantau diskusi mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa memberikan salah satu pemanting karena ketika whats app saya diminta untuk memanting, mudahan-mudahan manting yang saya berikan bisa menjadi warna dalam diskusi kita hari ini.

(velix) 10.05

Terima kasih mbak Shabia sebagai moderator, Selamat siang salam sejahtera untuk kita semua, pertama – tama kami mengucapkan terimakasih kepada IRE karena telah mengundang BAPPENAS untuk sharing tentang kebijakan-kebijakan terakhir yang dirumuskan Pemerintah tapi lebih khusus BAPPENAS didalan rencana pembangunan lima tahun kedepan. Yang kami hormati teman-teman IRE Bapak Bambang Hidayana beserta jajaran, Bapak Arie Sujito, kemudian senior kami Bapak Sutoro dan semua teman-teman dari Jogja dan juga Bapak Ibu Pimpinan dari Pemerintah Provinsi dari berbagai Provinsi di tanah air. Dan Bapak Ibu Pemerintah Kabupaten Kota dari seluruh tanah air, tentu juga senior kami Bapak SEKJEN Anwar Sanusi. Sebenarnya apa yang Beliau (Anwar Sanusi) sampaikan sebenarnya sudah senalar dengan Beliau, karena kami satu pertapaan bersama Pak Anwar. Bapak Ibu Pemerintah Provinsi Kabupaten sebenarnya kami juga beguru dengan IRE , Karena di IRE ada Mas Arie Sujito, Mas Sutoro, dan semua yang memiliki peran penting di dalam proses penyusunan UU Desa di tahun 2012,2013, dan 2014. Izinkan kami akan pada *story telling* saja, jadi kami menceritakan langkah – langkah yang telah dilakukan oleh BAPPENAS terutama dalam satu tahun terakhir di dalam merumuskan kebijakan Desa di dalam RPJM. Mungkin sebagai langkah awal RPJM di kebijakan Presiden tentang arah lima tahun kedepan ini agak berbeda dengan lima tahun sebelumnya. Jika lima tahu sebelumnya dokumen RPJM itu cukup tebal ada sekitar 1000 halaman beserta lampiran – lampiran sekitar 1200 halaman kemudian exercise atau narasi kebijakan tentang pembangunan Desa dan kawasan Perdesaan memiliki ruang yang cukup banyak dari sisi narasi kebijakannya kemudian jumlah halamannya.

Tetapi kami mendapatkan catatan baru dari Bapak Presiden agar lebih membuat dokumen RPJM ini lebih *simple* kemudian narasi kebijakan yang diletakkan di dalam RPJM lebih padat, kemudian kalimat-kalimat yang menjelaskan satu persatu kebijakan strategi atau menjelaskan program kegiatan semakin dikurangi. Sebagai akibat dari perubahan narasi ini kita membuat kebijakan RPJM relatif *simple*. Di detik – detik terakhir dalam proses penyusunan bersama tim IRE dengan Kementerian Desa masih ada perubahan-perubahan yang terjadi hingga satu minggu sebelum proses peraturan Presiden nomer 18 terbit. Hasil diskusi bersama IRE bagaimana kita letakkan kebijakan aset Desa itu menjadi diskusi bersama Pak SEKJEN di salah satu tempat yang berada di Jakarta dan di akhir – akhir Desember bersama tim IRE. Kita menyoroti bagaimana memaknai salah satu isu strategis di Desa tentang aset Desa karena akan terkait dengan semua hal. Kita memiliki rezim UU 23 otonomi daerah ada rezim kehutanan , rezim UU Desa, ada juga rezim UU tata ruang dari sisi regulasi bagaimana kita meletakkan kebijakan aset desa sehingga akhirnya dengan penyederhanaan bahasa kita meletakkan penataan aset Desa didalam satu UU terpadu. Dari hasil siding cabinet tanggal 11 Desember 2019 tentang dana Desa yang dibawa oleh Menteri Desa ada beberapa poin arahan dari Bapak Presiden yang harus kita dorong kuncinya revitalisasi BUMDES baik klaster-klaster Desa, kampung atau Negari. Sehingga kita melakukan perubahan di dalam drafter RPJM kebijakan revitalisasi BUMDES dan menuliskan target BUMDES maju, berkembang dan bersama. Ini adalah konsekuensi kita untuk merumuskan kebijakan , strategi-strategi baru dan juga dukungan pembiayaan. Izinkan kami sharing beberapa slide, pertama adalah dari sisi arahan Presiden yang menjadi poin penting bahwa kita fokus dalam lima agenda besar yaitu :

1. Pembangunan SDM berkaitan dengan aspek desa Penguatan aparatur, perangkat desa , manajerial SDM
2. Pembangunan Infrastruktur Dana Desa , kontribusi dari beberapa sektor kementerian penguatan dari sisi pelayanan dasar
3. Penyederhanaan Regulasi menata Indek Pembangunan Desa atau Indek Desa membangun konsiliasi terhadap Indek Desa. Contoh penyerahan Regulasi
4. Penyederhaan Birokrasi fleksibilitas dalam perencanaan Desa , desa bervariasi yang sangat beragam , Desa yang kelembagaannya telah konsolidatif seperti di Jawa berbeda dengan kawasan timur Indonesia
5. Transformasi Ekonomi Desa menjadi pondasi untuk menggerakkan ekonomi daerah

Kami telah sepakat dengan arahan SEKJEN KEMENDES Desa menjadi simpul ekonomi baru pasca covid ini banyak orang yang kembali ke Desa memilih komoditas cukup satu atau dua desa dan akses pasar bisa konek dengan *market place* yang ada terutama masuk ke dalam digital *platform*.

KEMENDES selama ini juga mendorong untuk melakukan transformasi ekonomi. Perdebatan isu dalam konteks teori tentang kedaulatan Desa , partisipasi masyarakat . Apakah ini hanya isu ekonomis atau isu tentang konsep inklusi *government, community base* . kami didalam RPJM lima tahun kedepan ini meletakkan konsep *integrated plural development polici* tentang pembangunan Desa atau kampung terpadu. Menjadi salah satu instrument kami melihat desa harus *integrated karena* begitu banyak sektor yang masuk ke Desa atau kampung. Yang jadi permasalahan adalah integrasinya dan kami sepakat dengan IRE tentang penguatan perencanaan pembangunan di Desa. Kami juga sepakat dengan Mbak Dina tentang *bottleneck* keterpaduan antara perencanaan provinsi , Kabupaten kota , ataupun kampung. Kami mendorong desa terpadu tapi tetap prinsip tentang kolaborasi dengan kementerian Desa,BUMN, dan lembaga usaha dan sosial entrepreneur. Misalnya Astra saat ini memiliki Desa asri atau lembaga – lembaga yang masuk ke Desa , ini ada pendekatan kolaboratif *government* dari hal yang penting dan prinsip penting untuk IRE bagaimana kedaulatan Desa tentang masyarakat sehingga kami juga mendorong konsep *open government* didalam praktek- praktek perencanaan di Desa. Sehingga kami bisa mendorong sejauh mana partisipasi *women, masyarakat – masyarakat pure people* yang ikut dalam proses perencanaan. Ini tidak hanya sebatas konsep tetapi kami tidak langsung mendorong teman-teman Kementerian dan mitra pembangunan beberapa program misalnya dari kompak, IFAD (International Fund for Agricultural Development) selama 6 tahun kedepan ada program tekat dari 2020-2025 dan transformasi ekonomi Kampung nambah baru yang kita dorong di 5 wilayah Provinsi yaitu Papua, Papua Barat, NTT, Maluku Utara dan Maluku, prinsip yang kita dorong dalam program tekad ini yaitu *open government*. Juga ada program dengan mitra kami *WATCH BANK* program lima tahun kedepan merupakan moment untuk ,menguatkan perencanaan desa yang paling penting penguatan aparat, penguatan kecamatan sebagai simpul dari klaster-klaster Desa atau Negeri. Kementerian Desa, Kemedagri, dan BAPPENAS yang menjadi PAU dalam konteks P3PD ini. Salah satu konteks didalam P3PD ini, kita dorong tentang desa inklusif dari sisi partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan, transparansi APBDES, penguatan system informasi, peran perempuan dalam konteks perencanaan pembangunan desa. Kami menggunakan investasi dana dalam P3PD yang diolah oleh salah satu teman kami yang berada di KEMENDES. Mudah-mudahan program Desa Inklusif ini bisa sejalan dengan arahan dari IRE dan BApak Ibu sekalian dalam konteks penguatan perencanaan pembangunan Desa. Konsep RPJM Desa kami menggunakan *Integrated Plural Development Policy* merupakan pendekatan lama sejak tahun 70an dan sering di pakai oleh beberapa Negara, tapi kita tetap mengadopsi pendekatan ini tapi disesuaikan dengan kebutuhan kita selama lima tahun kedepan baik pelayanan dasar, aparatur, pendampingan Desa, penataan Desa yang menjadi

catatan kami bersama IRE tentang batas Desa dan Aset Desa. Kemudian ini target – target yang kami sampaikan dari sisi target RPJM baik dari Desa yang tadi pak SEKJEN sampaikan ada Desa mandiri, berkembang dan tertinggal, BUMDES dan BUMDES bersama dan sekarang kita dorong yang KPPN sejumlah 62 kawasan Pedesaan Prioritas Nasional untuk prukades mendorong satu atau dua komunitas yang unggul secara terpadu. Kami, KEMENDES, PUPS, APR yang merumuskan *masterplan* terhadap 62 KPPN yang ada di Indonesia. Dalam konteks pemetaan pembangunan desa terpadu ini kami ingin berbasis *mapping*, kami melihat *mapping* sebagai realitas yang kita hadapi. Kami melihat ada saudara kami dari nabire dan PAPUA yang ikut dalam gabung dalam diskusi ini. Desa –Desa tertinggal masih merah berada di Kalimantan dan Kepulauan Timur Indonesia, Papua, NTT dan Kepulauan Maluku. Target lima tahun kedepan menjadikan 10.000 Desa tertinggal menjadi Desa berkembang dan kami akan fokuskan ke wilayah timur dengan skema – skema investasi kita manfaatkan dari KOMPAK, WATCH BANK, IFAD dan lembaga – lembaga lainnya kita dorong dari pelajaran adopsi – adopsi pendekatan dari Jawa , Sumatera dan penyesuaian lokalitas di wilayah timur dan bisa dijadikan pelajaran menarik dalam kontreks mengelola kampung atau Desa. Dari 62 KPPN kami memilih satu atau dua titik yang menjadi prioritas nasional, tapi kami juga menyadari Bupati mengusulkan sesuai dengan PERDA masing-masing sesuai dengan kebutuhan Daerah masing – masing. Masih banyak point yang lain tapi ka i akan membagikan materi ini, kami sangat sepakat dengan pandangan dasar dari IRE dan peserta tentang bagaimana penguatan perencanaan di Desa. Tentu kami akan melihat protes – protes apa yang akan kita dorong mulai dari KPPN, BUMDES, percepatan transformasi dari 10.000 Desa tertinggal menjadi 10.000 Desa berkembang sesuai dengan target Presiden kita bisa capai melalui penataan perencanaan penguatan Desa , kampung atau Negari. Demikian sedikit sharing dari kami

Waasalamualaikum Wr.Wb

Shalom

(lanjutan Pengantar) Dina Mariana (53.34)

Ibu Bapak yang saya hormati, seperti Yng disampaikan baru saja oleh Pak Velix bahwa IRE di akhir tahun 2019 secara instensif mendekati BAPPENAS untuk ikut memberikan kontribusi terkait dengan RPJMN 2020-2024. Kita mengambil momen itu dalam rangka penguatan Isu Desa di RPJMN. Saya ingin cerita sedikit ada hal baru yang menarik bagi IRE di 2020-2024 yang disampaikan oleh Pak Velix dari awalnya *backgroubd study* yang awalnya teknokratis yang waktu itu kami komunikasikan dengan BAPPENAS bahwa kalau narasinya masih seperti ini maka fokus penguatan Desa akan semakin sulit. Karena masih ada dominasi – dominasi pusat dalam pengaturan Desa sehingga keterbukaan BAPPENAS membuat semakin asik untuk berbincang

tentang strategi yang bisa di tempuh dalam penguatan Desa. Sampai pada akhirnya di rancangan awal dan akhir kita mengkomunikasikan beberapa isu – isu krusial atau yang kami anggap penting. Karena kita ambil dari hasil riset – riset tentang revitalisasi UU DESA . ada 12 isu sebenarnya yang kami tawarkan dalam RPJMN, tapi karena banyak sekali yang harus diatur oleh pusat dan waktu itu ada beberapa isu yang bersifat terbuka dimasukan dalam RPJMN. Ada isu penataan Desa termasuk batas Desa, Pengelolaan asset secara ilusif, pendampingan desa dan ada peningkatan kapasitas SDM. Berdasarkan hasil diskusi kami , kami sebagai IRE merasa berdosa jika tidak meneruskan advokasi RPJMN sampai di level Desa otomatis daerah juga harus terlibat. Di pertengahan tahun ini kita mencoba mendesign apa yang bisa dilakukan oleh IRE untuk menyambungkan RPJMN,RPJMD, dan RPJM Desa dengan memanfaatkan momentum PILKADA 2020 ini. Mengawali program ini di tahun ini dengan mencoba mencari benang merah apa yang bisa disambungkan sesuai dengan konteks masing-masing di setiap Daerah. Kebutuhan untuk mengkoneksian RPJMN :

1. Momentum penyusunan teknokratik RPJMD di seluruh Daerah
2. Membangun sinergi perencanaan pembangunan nasional, daerah, dan desa.
3. Mendorong isu desa dan kawasan perdesaan menjadi isu strategis daerah
4. Penguatan atas rekognisi dan subsidiaritas dalam pengaturan desaa
5. Penguatan peran pembinaan dan pengawasan dalam RPJMD
6. Mendorong RPJMD Dan RPJM Desa mampu mengatasi pandemi Covid 19 di Desa

Dalam rangka menyambungkan antara RPJMN dan RPJM Desa IRE sendiri akan melakukan riset di dua Kabupaten yaitu Kabupaten Gunung Kidul dan Kabupaten Sleman. Karena memang kondisi covid ini kami sulit untuk mengakses daerah-daerah lain sehingga kami mencoba dari daerah yang dekat dulu yaitu DIY. Kami mencoba untuk menyambungkan RPJMD di dua kabupaten ini dengan isu pandemic yang menurut kami berdampak sangat kuat di Desa. Dalam waktu yang bersamaan juga kami juga melakukan riset tentang dampak ekonomi, sosial, budaya di Desa adanya pengangguran , adanya Desa wisata yang terdampak sesuai yang disampaikan SEKJEN sebelumnya dan Desa penyumbang buruh migran tertinggi seperti Kabupaten Kuningan, KDRT yang terus meningkat dan masih banyak dampak lainnya. Tantangan berikutnya yaitu perencanaan pembangunan Desa juga ikut terdampak pandemi karena adanya sejumlah regulasi yang mengikat seperti kebijakan BLT, di masa lalu penghasilan Kades dan perangkat yang juga banyak menyita alokasi dana Desa berdampak pada ruang *dispress* semakin kecil dan ada PERPU nomer 1 Tahun 2020. Kemudian ini adalah semacam keimanan kami terkait dengan UU Desa bahwa Desa harus dipandang sebagai subjek pembangunan berdasarkan asas rekognisi dan subsidiaritas. Pelajaran dari Pak Toro sebagai guru saya ini adalah hal wajib dan nantinya di RPJMD

juga harus memuat tentang hal ini. berangkat dari ini juga tentunya juga ada beberapa tantangan ketika berbicara tentang rekoneksi perencanaan tersebut yang pertama regulasi dan kewenangan yang selama ini dominasi dari pusat cukup kuat. Yang kedua ada problematika kelembagaan sinergi antar institusi yang ada pada level kapasitas, ini banyak kami temukan di level Desa. Tugas saya memancing diskusi agar lebih hidup saya akan menanyakan kepada narasumber, kepada BAPPENAS saya berharap cerita bagaimana memperkuat sinergi dengan desa dengan pusat tetap berdasarkan kewenangan Desa dan Pak Velix tadi juga banyak menyampaikan bagaimana semangat dari RPJMN pusat ini agar Desa menjadi lebih kuat walaupun ini ada tantangan di KEMENDES akan banyak cerita tentang data – data empiric terkait dengan pelaksanaan kewenangan Desa. Untuk mas toro apakah sebenarnya problem krusial selama ini yang dihadapi oleh Desa dan bagaimana peran Daerah untuk memfasilitasi Desa berdasarkan riset yang kami lakukan Daerah kadang mengalami kebingungan dalam mengambil tindakan untuk memperlakukan Desa seperti apa, karena menganggap dengan adanya kewenangan Desa dan anggaran yang sudah dimiliki oleh Desa bisa meyebabkan Desa jalan sendiri secara mandiri. Dan kepada Ibu Rhineka BAPPEDA Kabupaten Kuningan yang punya pengalaman dalam pengaruh keutamaan isu Desa dalam fokus RPJMD bisa menceritakan pengalaman bagaimana memfasilitasi Desa memperkuat RPMJ Desa yang terkoneksi dengan RPJMD. Mungkin ini sebagai pengantar saya untuk diskusi ini dan siapapun juga bisa menceritakan representasi kawasan Indonesia Timur, Tengah ataupun barat sehingga kita bisa Diskusi sesuai dengan konteks dimasing-masing daerah, terimakasih Mbak Shabia.

Sutoro (1:07:07)

Terimakasih Mbak Shabia, Assalamualaikum wr.wb selamat sore shalom salam sejahtera untuk kita semuanya Om swastiastu namo buddhaya salam kebijakan. Pak Bambang, Pak Sekjen, Pak Direktur, Ibu Rhineka Wati Sulaiman , dan para Kepala Bappeda , Kepala Dinas dan Ibu Bapak semuanya. Ada sejumlah kalimat kunci yang menjadi titik temu kita semuanya. Saya akan bicara Desa dalam perencanaan Daerah atau bisa disederhankan merencanakan Desa ini ada spek politik, spek pengetahuan dan spek gerakan. Politik itu bisa dialuskan menjadi suasana kebatinan yaitu diskursus, aspirasi bukan kontestasi yang berkembang. Desa adalah perkara penting apalagi hari ini di tengah covid 19. Desa melakukan fungsi haqiqi *protecting* dan *distributing* merupakan dua fungsi abadi Pemerintah di semua tempat. Fungsi dasar Pemerintah yaitu membagi dan melayani. Yang kedua terkait dengan pangan *algiculture* dimana Sekjen dan Pak Direktur sudah menyampaikan. Itu mengingatkan kita dengan tema-tema dulu tema infolusi dan tema subsidi. Meskipun subsistem Desa bisa menjadi sabuk pengaman bagi para pemudik atau warga yang

pulang kampung dari kota dan Desa. Soal pulang kampung atau mudik dua bulan yang lalu telah disampaikan oleh Presiden Ir. Joko Widodo dua – duanya itu berbeda lalu banyak orang yang dengan bahasa mentertawakan atau menyalahkan. Memang kalau menurut bahasa itu sama tetapi yang disampaikan Presiden itu adalah naluri seorang pemimpin dan itu adalah politik bahasa. Pemudik adalah bagian dari hilir mudik adalah bagian dari organisasi sementara untuk pulang kampung adalah rulisasi. Hari ini Presiden bicara lebih lantang dan keras lagi supaya jajarannya itu bekerja secara luar biasa (*extraordinary*) dan point ini saya kira terkait dengan perencanaannya yang harus luar biasa atau dalam literature kita sebut dengan *radical planning*. Sebenarnya kalau kita mengikuti politik teknokrasi dan partisipasi dengan lebih dalam akan menghasilkan *logica planning* bukan bisnis sosial *planning*, karena politik itu bisa disebut juga dengan masalah tapi dengan politik itu akan menjadi dinamis dan sesuai dengan kepentingan atau kehendak orang – orang banyak atau rakyat. Saya mau bicara tentang tiga level, pertama soal politik dan relasi kuasa. Perencanaan itu tidak peduli dengan ruang yang hampa dengan politik ada perbedaan antara yang direncanakan dan merencanakan. Yang merencanakan itu akan melakukan *spiring* dan yang direncanakan itu biasanya *resystem*, itu bisa kita tangkap bagaimana hubungan antara pusat Daerah atau bisa disebut diskoneksi terhubung satu dengan yang lain diibaratkan kita yang berada di Jakarta merasa jengkel kalau target – target pusat tidak dijalankan oleh Daerah. Tapi orang Daerah juga mengatakan ini tidak sesuai dengan konteks lokal apalagi Bupati karena merasa dapat mandat dari rakyat. Dan ini perbedaan atau ketegangan antara target pusat dengan kehendak lokal biasanya tidak diselesaikan dengan Susana kebatinan atau politik tetapi dengan teknokrasi. Teman – teman di BAPPEDA kan sudah canggih melakukan cocokologi, kreasi secara teknokratif bagaimana secara mehubungkan antara target pusat dengan kehendak daerah ada semacam nalar bahwa rezim perencanaan sama dengan rezim hukum yang bertingkat apalagi sudah diinterpensi dengan rezim keuangan. Ada mekanisme disinsentif bagi Daerah kalau tidak sesuai dengan target pusat makan akan jadi masalah pada sisi keuangan. Kepentingan rakyat berhubungan dengan target yang ditentukan oleh Pemerintah pusat. Pada sisi yang lain ada hubungan Desa dengan Kabupaten, karena hubungan Bupati dengan Desa dalam bentang sejarah berjalan tidak baik atau Bupati yang bertindak sebagai ruller atau penguasa yang mungkin berada di sejumlah Kabupaten yang minta umpeti dan di masa pilkada melakukan mobilisasi untuk mesin politik. Melakukan hubungan – hubungan yang klientelistik atau hubungan yang pantonase intinya merawat kepatuhan khususnya Kepala Desa da nada juga yang berperilaku buruk yang suka mengatur dan mengembalikan Desa agar patuh terhadap struktur yang birokratif. Kalau ada aturan yang terlalu banyak atau Daerah mengatur lebih dengan kerangka Negara yang birokratif ini terjadi UU diatur oleh Pemerintah diatur oleh

Menteri dan peraturan Menteri diatur oleh Bupati ini adalah point lama yaitu advokasi. Dan poin lain yang harus kita lakukan bagaimana menjadikan dua aturan Pemerintah dijadikan satu aturan supaya bisa terkonsolidasi dengan baik. Dan juga ada Bupati yang Populis Bupati yang suka menyenangkan tapi sebenarnya tidak menolong karena sebenarnya Bupati tidak mampu menembus struktur yang birokratif termasuk teknokratif. Tetapi ini ada celah yang bisa kita mainkan di satu sisi Bupati yang populis ini tergolong suka melakukan *distributing* tapi dia tidak melakukan *protecting* Desa dari struktur yang birokratif dan teknokratif. Saya kira ada sebagian kecil yang performis yang bisa menjalankan secara betul aturan fungsi *protecting* dan fungsi *distributing* pada Desa. Ada juga ceita hubungan Bupati dengan birokrasi yang tidak seragam. Pesan saya jika kita berhadapan dengan Bupati penguasa atau birokratif kita agak sulit untuk mencari jalan perubahan Desa kecuali kita ini bergerilya yang dilakukan bukan pada tingkat strukturnya tapi mendorong agen atau actor untuk bergerak emansipasai secara lokal. Jadi saya kira politik itu penting dan politik itu membutuhkan jembatan. Pengetahuan kritis atau kontekstual jadi kita tidak bisa bekerja dengan cara teknokratif atau eksekutif, kita harus mengimplementasikan dinamika lokal sesuai dengan Desa ataupun Daerah. Kata kunci RPJMN indek pembangunan Desa atau membangun Desa dan IPD saya kira menjadi sumber pengetahuan dasar untuk memahami Desa. Sebagai contoh di Yogya ada semacam teka – teki misteri, DIY mempunyai IPD dan IPN yang bagus tapi indeks kemiskinan juga tinggi, dan ini berbanding terbalik seteah kita telusuri ada semacam kesenjangan antara garis utara selatan dan garis timur barat timur barat yaitu Kulon Progo dan Gunung Kidul dan utara selatan Sleman dan Bantul. Ada cerita tentang Desanisasi dimana Desa menjadi penting untuk berdaulat, kemudian ruliersasi yang sesuai pesan Presiden tentang pulang kampung. Sleman dan bantul tingkat ruralisasi tinggi sehingga ini sumber sumber – sumber kemakmuran bisa dihasilkan secara dinamis dari tingkat lokal. Tapi Sleman dari 10 tahun terakhir ini terjadi perubahan perluasan aglomorasi perkotaan yang dinamis. Empat Kabupaten yang ada di DIY ini mempunyai tradisi berdesa yang sangat kuat Saya ingin mengatakan Desa yang sibuk dalam internal maka secara tidak langsung akan tertinggal dan terjadi kemiskinan. Artinya Desa tidak sanggup memanfaatkan ruang – ruang rural atau pedesaan yang lebih luas. Sebaliknya pembangunan regional yang tidak melibatkan perdesaan akan menimbulkan ketimpangan. Pengetahuan tentang rural itu adalah ruang bersama, sumber daya bersama antara Kabupaten dan Desa. Oleh karena itu harus dilakukan dengan baik sehingga arahan BAPPENAS terkait RPJMN mengenai pemerataan itu yang terus menerus kita samapaikan, kita harus berpikir secara rural atau agropolitan dalam rangka *radical planning*. Jika kita bicara rural kita tidak hanya bicara tentang tata kelola ruang melainkan juga harus memperhatikan lokal, seperti masyarakat, institusi, maupun Desa yang lengkap tatanan

sosial dan budaya setempat. Ruang Desa itu sebagai kehidupan masyarakat setempat. Representasi ruang Desa menghadirkan institusi lokal untuk melakukan konsolidasi, negosiasi, dalam Negara maupun lokal untuk membangun kawasan perdesaaan. Beberapa tahun yang lalu saya juga banyak diskusi dengan direktoral jendral Perdesaan bahwa pembangunan kawasan Perdesaan jangan hanya dilihat dari sisi ruang atau komoditas. Tiga sisi harus diperhatikan juga, pertama pemerataan pembangunan, memperkuat desa dengan kerja sama dan holding (holding pernah ada di RPJMN dulu tai belum bisa dimanfaatkan dengan baik) dan yang ketiga pemberdayaan masyarakat. Soal gerakan repretasi dan emansipasi sebelum adanya UU lahir kami menulis buku mutiara perubahan sebagai wadah inovasi dan pada waktu itu uang juga sangat terbatas. Ada dana Desa tapi APBDnya sangat rendah tapi dengan gotong royong lokal bisa direalisasikan dan yang paling penting proses pemebelajaran edukasi sosial kerja sama dengan organisasi masyarakat. Desa yang sekarang terkenal merupakan rintisan – rintisan sejak tahun 2009 yang memanfaatkan *common pool resources* kalau sekarang salah satunya menghasilkan desa wisata dan itu memberi daya tarik meskipun saat ini desa wisata mengalami krisis. Jadi masing – masing daerah berbeda dengan konteks politik harus diperhatikan dan BAPPEDA juga harus berpikir secara teknokratik seperti adanya diskusi yang lebih praktis dan harus teknopol yang artinya memadukan antara pengetahuan ilmiah dengan pendekatan politik yang memperhatikan kebatinan lokal, Pusat memperhatikan Daerah, Dan Daerah memperhatikan Desa. Dengan cara itu perencanaan lebih maju, radikal dan progresif melebihi teknokratik.

Rienekiawati

Assalamualaikum Wr. Wb

Kami dari Kabupaten Kuningan ingin berbagi pengalaman tentang isu terkait pembangunan Desa di dalam Perencanaan Kabupaten. Desa penunjul atau Desa unggul adalah program kami. Kesedaran pembangunan Desa dalam kerangka pemikiran atau pembangunan Nasional menjadi pendorong kami. Dari sisi ideologis memiliki tiga etnititas yaitu ekonomi, budaya, ekologi. Zaman dulu Desa masih focus terhadap pembudidayaan alam saja mereka unggul dalam satu hal. Kedua Desa memiliki rentan yang pendek dalam mengambil kebijakan karena birokrasi Desa yang pendek. Dari dua hal tersebut Kami yakin Desa akan menjadi daerah yang unggul sesuai dengan karakter yang dimiliki. Adanyaa UU Desa tidak hanya memberikan Dana Desa tapi juga memberikan kewenangan dan kedaulatan Desa bagaimana Desa bisa membangun sesuai dengan karakter yang dimiliki oleh Desa tersebut. Kegiatan yang kami lakukan, kami tidak pernah memframing Desa dengan kegiatan yang seragam, tapi kami cukup mendengarkan apa yang mereka harapkan dan apa yang menjadi potensial di daerahnya akan kami bantu. Isu Desa

menjadi lebih seksi karena program pengembangan Desa sekarang sudah ada di Kementerian, Provinsi dan Kabupaten. Fakta di Kabupaten Kuningan ada 150 Desa yang berbatasan dengan hutan juga merupakan kantong – kantong kemiskinan, wisata, pertanian dan lainnya. Kami bekerjasama dengan TNGC dan PERHUTANI untuk mengelola Desa wisata, dari potensi – potensi yang ada di Desa dan kondisi faktual kami memutuskan untuk perencanaan pembangunan Desa. Jumlah Daerah di Kuningan ada 361 Desa dan 15 Kelurahan , ada 3 Desa yang sudah maju dengan ciri khas masing. Di Cibubur ada item internasional yang diikuti wisatawan asing, Cibuntu mendapatkan predikat terbaik sebagai desa wisata terbaik di Asean. Kades yang bagus bisa menggerakkan potensi masyarakat untuk berkembang. Desa Pajambon merupakan Desa yang menerapkan PKKBM masyarakat kerja sama dengan TNGC. RPJMD teknokratis kami menyusun ini di pertengahan 2017 dengan latar belakang pemikiran pembangunan Desa melalui proses panjang kami dibantu Dengan IRE untuk merealisasikan RPJMD di Kabupaten Kuningan. Dokumen RPJMD ini kami sampaikan Ke KPU agar para kandidat bupati dan calon wakil bupati Di Kuningan bisa mengusap konsep sesuai dengan RPJMD yang sudah di bangun tahun 2017 oleh kami. Desa menjadi roh visi misi kandidat calon. Di tahun 2018 Bupati dan Wakil Bupati terpilih secara eksklusif mencamtukan Desa sebagai visi misinya yang bertema Kuningan maju berbasis Desa di tahun 2023. Di BAPPEDA kami mengusung program desa Pininjul, strateginya bagaimana menyebarkan pusat – pusat pertumbuhan ekonomi di Desa. Missal Desa wisata butuh sokongan IKM dari desa sebelahnya. Sinergi antar desa bisa membantu kabupaten kuningan untuk merealisasikan. Road map Desa Pinunjul ada 3 , pertama mengembangkan data yang ada di Desa untuk menentukan identitas Desa dan diserahkan oleh Desa, kedua bagaimana membagi peran dengan koperasi, BUMDES intinya kami dari BAPPEDA tidak pernah memakasa. Ketiga Perkuat Brand Image Desa dan meningkatkan daya saing. Kami juga menetapkan Desa Pinunjul ke dalam keputusan Bupati. Kami tunjuk 100 Desa sebagai piloting untuk bisa menata step by step agar bisa lebih unggul sesuai bidangnya. Desa Pendidikan berbentuk pesantren yang menjadi rujukan di Asia Tenggara, di kawasan pesantren pertumbuhan ekonomi juga sangat cepat. Pengertian Desa Pinunjul adalah Desa atau kelurahan yang memiliki keunggulan di dalam bidang tertentu untuk meningkatkan ekonomi produktif. Ekodes Pininjul berbentuk data base yang berfungsi untuk memotret ekonomi yang ada di Desa. Pelaku usaha yang ada di Desa kami masukan ke data base, kami kedepan punya cita – cita usaha lokal yang tersebar di Desa menjadi bagian dari ekonomi Kabupaten. Pembangunan Infrastruktur Kabupaten Kuningan bisa menggunakan bahan baku yang ada di Desa. Kemudian desa mata air kami juga memberikan contoh e kemasan , kemudian juga ada beras organik yang di packing lebih menarik dan Bupati akan membuat kebijakan agar PNS wajib membeli beras organic pada tiap bulannya. Untuk mewujudkan Desa Pinunjul kami

melakukan upaya – upaya kolaborasi dengan berbagai pihak salah satunya IRE. Kami sekarang sedang melakukan kerja sama dengan *food court* DKI Jakarta, Kami juga membangun revitalisasi waduk Darma, Desa wisata yang akan ditingkatkan menjadi kelas Dunia (menurut Gubernur Jawa Barat). Kami sebagai BAPPEDA tidak mau melihat masyarakat jadi penonton ketika daerahnya menjadi pusat ekonomi berkembang kami coba membuat konsep bagaimana masyarakat menjadi pelaku utama untuk ikut menggerakkan ekonomi di daerahnya. Di sini kami juga bekerja sama dengan mitra kerja seperti IRE dalam menyusun bisnis modal dan bisnis plannya dan masih banyak lagi. Dampak covid 19 di bidang pertanian akan membuka lahan pekerjaan baru yang bekerja sama dengan Perhutani. Prinsipnya adalah bagaimana kami membangun Desa tidak harus memframing 100 Desa dengan kegiatan yang sama, tapi kami cukup duduk dan mendengarkan apa yang masyarakat Desa inginkan. Pertanyaan dari mbak Dina tentang banyaknya buruh migran Di kuningan ?” betul, justru dengan program Desa Pininjul jika Desa mampu memetakan potensinya dan kami juga akan membantu bersinergi melaksanakan pembangunan sesuai dengan karakter itu juga akan mengurangi kemiskinan, pengangguran dan lainnya bisa diselesaikan. Kami juga mendorong masyarakat Desa untuk menggunakan Teknologi di masa kini, menurut perkembangan zaman Desa juga harus dituntut untuk menggunakan teknologi dalam kehidupan sehari – hari.

Sesi Tanya Jawab

1. **Bapak Soeharko** semua kebijakan pemerintah pusat dan daerah diarahkan untuk mengatasi dampak pandemi dan sekarang ditunjukkan untuk menghadapi kondisi kenormalan baru problemnya masyarakat Desa menganggap sekarang kondisinya telah normal lagi seolah wabah dianggap sudah berlalu, sementara krisis tidak kelihatan, kemarahan Presiden yang tersiar luas itu sangat wajar kemudian kebijakan seperti apa yang disiapkan pemerintah (pusat dan daerah) dalam menghadapi situasi kekinian dari perjalanan pandemi ini

Tanggapan Dari (Velix)

Bahwa posisi dasar kita dari perjalanan covid ini , kita bisa melihat selama 3 bulan ini bisa menyimpulkan yang pertama strategi yang menyesuaikan konteks lokalitas. karena ketika memetakan daerah yang terdampak covid, ada daerah yang episentrum, ada daerah yang masuk zona hitam, zonz kuning dan zona merah. Kita bisa melihat daerah episentrum ini ternyata lebih terkonsentrasi di daerah kota, JABODETABEK, Surabaya Raya, Malang Raya dan kota – kota lainnya. Kita melihat di Papua juga yang paling terdampak adalah kota – kotanya. Yang kedua dengan

keterbatasan daerah yang terbatas dari resources pelayan dasar kami juga masih melihat status Kabupaten Kota yang masih hijau yang dalam konteks covid ini ada 100 Kabupaten. Bagaiman kita bisa menjaga Desa yang relative tertinggal pelayanan dasar juga terbatas, sehingga kita bisa mengantisipasi jika terjadi korban dalam covid ini yaitu pasien maka PEMDA akan membuat cukup kesulitan memeberikan pelayanan kepada daerah yang tertinggal seperti alat penunjang kesehatan yang ketiga ada fenomena yang terjadi konteks rualisasi . orang – orang yang kembali ke Desa yang episentrumnya berada di Jawa, sehingga instrument yang kita dorong adalah harus menggunakan dana desa kita arahkan untuk kegiatan-kegiatan memulihkan ekonomi dan mempercepat hasil panaen sekitar 3-4 bulan, konsep ini kami contohkan pada kampong rempah, bisa panen cepat, memiliki supplay choice dan harga yang murah dan nilai yang bagus. Fenomena rualisasi bisa kita dorong dengan komoditas yang memiliki nilai tambah dan memiliki market global dan terbuka untuk ekspor. Ada 60 Desa yang mengelola kampong rempah akan kami bangun kerjasama dengan kemeterian agar terus bergerak memulihkan ekonomi.

Tanggapan dari Rhineka

Yang utama adalah kami ada program pemulihan ekonomi, untuk di bidang pertanian dan pangan kami memiliki program sistem pengaman pangan ada masyarakat miskin yang secara karakteristik tidak mungkin di berdayakan akan terus kami bantu. Kedua IKM kami akan memberikan intervene suku bunga untuk kredit suku rakyat dengan bekerjasama dengan Bank kuningan kami akan menanggung setengahnya intervensi suku bunga untuk rakyat. Kami juga akan membeli produk IKM untuk digunakan bansos selanjutnya. Di sector perikanan kami juga membeli ikan asap yang memiliki banyak industry kecil yang berkembang di kuningan. Mekanisme seperti ini diharapkan segera memulihkan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Kuningan.

2. Djoko Pugugh (pertanyaan)

Apakah rancangan teknokratis yang berbasis wilayah juga di konsultasikan di beberapa daerah, Provinsi, Kabupaten ataupun Desa, kalau di dua level itu tidak nyambung maka Desa akan kasihan pengalaman dari BLT Kepala Desa yang tidak bekerja secara langsung hanya verivikasi data, bagaimana mengkonsultasikan dari perancangan teknokratis berbasis wilayah dari para pihak provinsi, kabupaten ataupun Desa ? Rancangan yang sudah dibentuk harus kita ubah di masa pandemi ini.

3. Yusuf (pertanyaan)

Rancangan akhir teknokratis RPJMN yang diusulkan mas toro terkait isu penguatan desa

menjadi satu regulasi itu masuk di dalam prioritas RPJMN 41 ? sistem informasi yang ada di kuningan selain e ekonomi apakah ada aplikasi lain yang bisa diintegrasikan di desa

4. Slamet (pertanyaan)

Bagaimana pendataan potensi ekonomi desa dilakukan oleh pemerintahan desa sendiri atau kerjasama dengan pihak luar, jika dikerjasamakan bagaimana keberlanjutannya.

1. Khairul Rizal

Pak slamet , Memahami dulu arti RPJMN, RPJMN sendiri bagi kami berarti sebagai janji presiden yang dituangkan ke dalam dokumen program untuk diadministrasikan secara programatik dibiayai dari turun menurun hingga APBN. Proses politik harusnya semua unsur pemerintahan udah paham garis besar pembangunan RPJMN ke depan sesuai dengan janji presiden. Begitu juga apa yang dilakukan di Daerah itu merupakan proses yang sama sesuai dengan janji kampanye kepala daerah bisa di cek BAPPEDA. Disamping itu dalam penyusunan RPJMN perlu adanya konsultasi publik tentunya dilakukan sebanyak mungkin oleh masing masing bidang di BAPPENAS tentunya juga akan yang terkonsolidasi sebagai keseluruhan RPJMN. Dengan harapan secara gagasan bisa dipahami secara umum, itulah secara proses RPJMN. Bagi yang berada di tengah seperti Kabupaten dia punya arahan dari kepala daerah tapi dia juga memiliki arahan dari BAPPENAS sesuai Presiden. Contoh Desa digital itu masuk ke RPJMN, kita terjemahkan ke dalam program P3PD ini memang agak lebih teknis, dalam bahasa politik berarti sudah di komunikasikan sejak kampanye presiden.

Pak yusuf

Penguatan secara kewenangan enggak ada yang berubah ada di UU no 6 tahun 2014 fundametal ada di UU. Selama UU no 6 tidak dirubah seperti itulah kewenangannya tinggal implementasi dari UU apakah konsekuensi atau tidak. Sejauh ini secara UU Desa masih belum berubah. Penguatan Manajemen, Konsen Utama RPJMN adalah penguatan kapasitas desa, kita banyak melakukan study, temuan, dalam lima tahun terakhir dana desa digunakan untuk pembangunan desa, kita punya IPD indeks yang paling tinggi kenaikan nilainya dari unsurnya administrasi pemerintahan. Di satu sisi nilai terkecil dari Indeks Pembangunan Desa adalah pelayanan dasar padahal tujuan pembangunan desa adalah menyediakan pelayanan dasar untuk semua, banyak juga studi bahwa desa kurang mampu mengolah keuangan , merencanakan proyek, membangun desa yang kompleks dan masih banyak lagi itu adalah konsen kita. Dan poinnya adalah kualitas belanja di Desa itu rendah karena kapasitas yang belum memadai, sejalan dengan janji Presiden fokum

SDM , RPJMN juga meningkatkan kapasitas terhadap Desa. Kapasitas Desa (konteks manajemen) ini ada dua yaitu kapasitas aparatur (pemerintahannya) dan kapasitas masyarakat desanya. Itulah yang kami sasar penguatannya baik aparatur maupun masyarakatnya. Bahkan supra desanya kami juga sasar kecamatannya termasuk koordinasi di tingkat pusat juga lebih ke manajemen data . target P3PD didalam lima tahun terakhir harus tuntas kapasitas desa naik bari sisi aparatur ataupun masyarakat. Dan semua proses penguatan ini karena kita dalam konsep digitalisasi itu semua berbasis digital platform. Maka janji Presiden Desa Digital tertuang didalam program ini. Penguatan ini hanya di level manajemen.

2. Rhineka

Sistem ini baru berjalan hampir 2 tahun, sistem ini memotret real pelaku ekonomi di desa dan belum di integrasikan dengan sistem yang lain. Jadi kami berharap semua pelaku ekonomi di desa terlibat di dalam sistem ini dan tahun ini kami akan membuka para pihak yang akan berkolaborasi dengan kami, semua pihak bisa mengakses potensi yang ada di Desa bagi yang berminat untuk kerjasama maupun kolaborasi. Desa sendiri ada update data setiap saatnya juga bisa berkomunikasi dengan kami secara langsung, data bisa diberikan ke kami secara manual. Di sistem ini ada sistem unit reaksi cepat menjangkau pada saat sebelum mosembang, desa bisa meninggalkan pesan tentang program – program apa yang diinginkan dan butuh bantuan dari pemerintah. Sedangkan untuk data potensi kami belum melatih masyarakat untuk mengisinya.

Pak Toro (Penutup Narasumber)

Gagasan atau rancangan teknokratik itu mengundang pertanyaan. Kalau kita merencanakan membangun jalan lebih muda daripada institusi ataupun manusia. Perencanaan institusi atau manusia sering tidak membawa perubahan besar. Di dalam makalah saya pengalaman sleman, jepara rulisasinya juga berjalan dengan baik di luar perencanaan,. Begitupun Gunung kidul ada gerakan menanam pohon yang dilakukan oleh jaringan, program yang dulu proyek besar airisasi malah justru gagal. Ada dua pengalaman penting saya dapat cerita tiga tahun yang lalu saya mendapat curhat dari direktur perencanaan pembangunan desa. Beliau mengatakan “ kami membuat perencanaan kabupaten yang sudah sangat canggih dan didukung oleh 200 universitas yang ada di kabupaten, tapi tidak ada yang laku di dean bupati. Saya jawab perencanaan itu sangat canggih tapi tidak disertai dengan suasana kebatinan daerah. Kedua pengalaman agropolitan menjadi proyek yang menyebar di banyak daerah, penelitian sudah di lakukan dan

dampaknya tidak terlalu signifikan. Karena yang dijalankan oleh agropolitan tidak sesuai dengan radical planning. Jadi harus diletakan dengan desentralisasi, demokrasi lokal, dan emansipasi lokal. Pemangku kepentingan ini penting untuk menyambungkan horizontal antara politik, partisipasi dan teknokrasi diletakan di dalam kerangka suasana kebatinan lokal. Yang kedua merencanakan desa jangan terlalu detail karena kalau kita membayangkan secara detail maka akan terjadi kesenjangan, yang penting kita memberikan pengetahuan secara singkat yang mudah dipahami dan tentu Desa bisa merencanakan sesuai konteksnya masing – masing sesuai yang berkembang di Desa. Organisme kita mendorong Desa sebagai organisme dan satu titik ruller agar tidak jadi kesenjangan antara Desa dan Kabupaten.

Mbak Dina (catatan penutup)

Sebenarnya tugas IRE adalah recalling untuk untuk mengembalikan ingatan kita tentang isu dan perencanaan desa agar diberikan ruang yang memadai didalam dokumen perencanaan pembangunan daerah ataupun desa. Terimakasih kepada partisipan yang sudah mengikuti acara diskusi webinar ini yang dari awal hingga akhir ikut menyimak diskusi ini. jadi memang kami berkomitmen pengarus utamaan ini tidak hanya berhenti pada forum ini tetapi akan terus kita kawal dalam kesempatan berikutnya dalam bentuk dokumen perencanaan maupun aksi – aksi dari level daerah maupun Desa sebagaimana yang biasanya kami lakukan dalam mengawal isu pembangunan dan perencanaan Desa. Pastinya ini bukan diskusi terakhir yang diselenggarakan oleh IRE , masih banyak serial – serial diskusi berikutnya yang pendekatannya lebih sektoral tapi basisnya masih Desa. Dan kami akan mengundang untuk tertarik dan begrabung diskursus Desa sehingga ini menjadi bahan proses kerumusan kebijakan di masing – masing daerah ataupun Desa.

